

**KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**

**KABUPATEN BENGKALIS**

**2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

**KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**

**LAPORAN KINERJA KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**

**TAHUN 2018**

**Daftar isi**

Daftar Isi I

Kata pengantar II

Ringkasan Eksekutif III

Bab I Pendahuluan 1

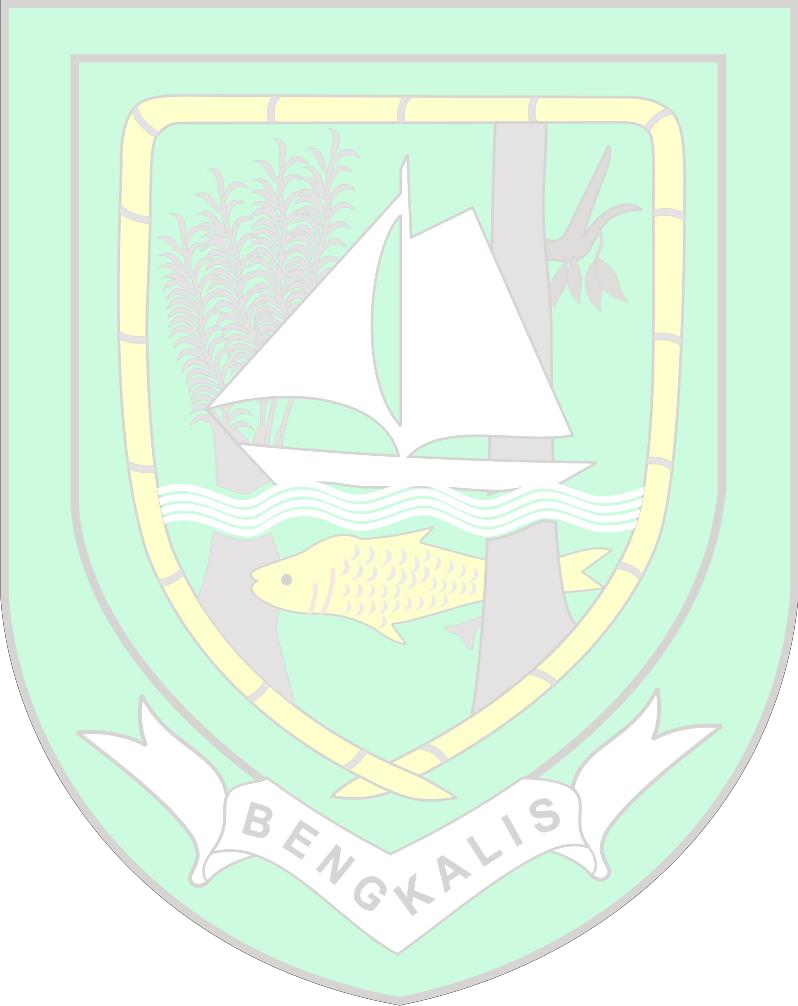
1. Latar Belakang 1
2. Maksud dan tujuan 2
3. Tugas dan fungsi 2
4. Struktur organisasi 3

Bab II Perencanaan dan perjanjian kinerja 5

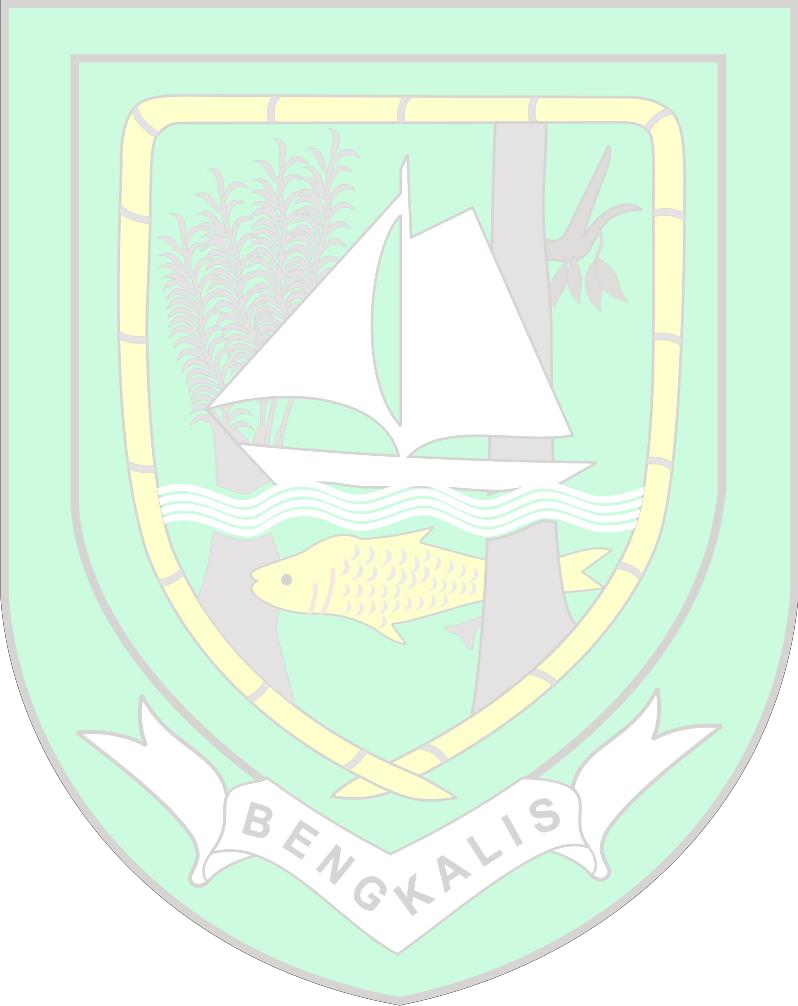
Bab III akuntabilitas kinerja 7

1. Pengukuran kinerja 7
2. Evaluasi dan Analisi Akuntabilitas Kinerja 7
3. Akuntabilitas keuangan 8

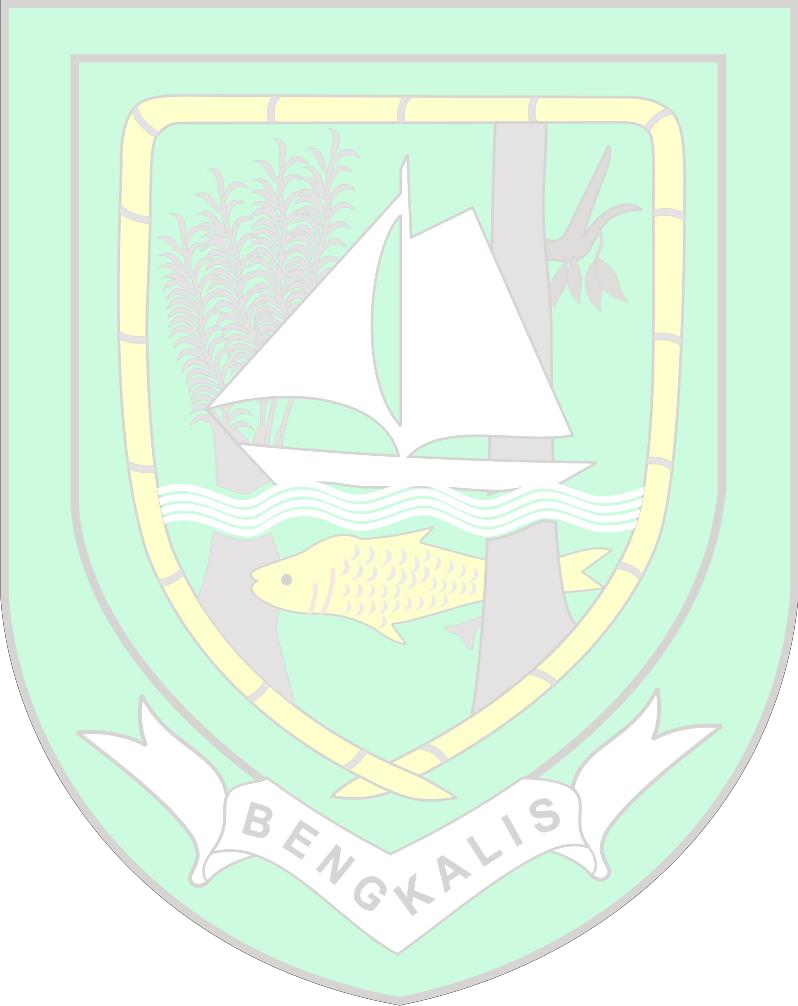
Bab IV Penutup 12



I



**KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Bathin Solapan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bathin Solapan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Bathin Solapan tahun 2018 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di

Kecamatan Bathin Solapan pada tahun‐tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan

dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

**Sebangar, Januari 2019**

**Plt. CAMAT BATHIN SOLAPAN**

**AZUAR, SH**

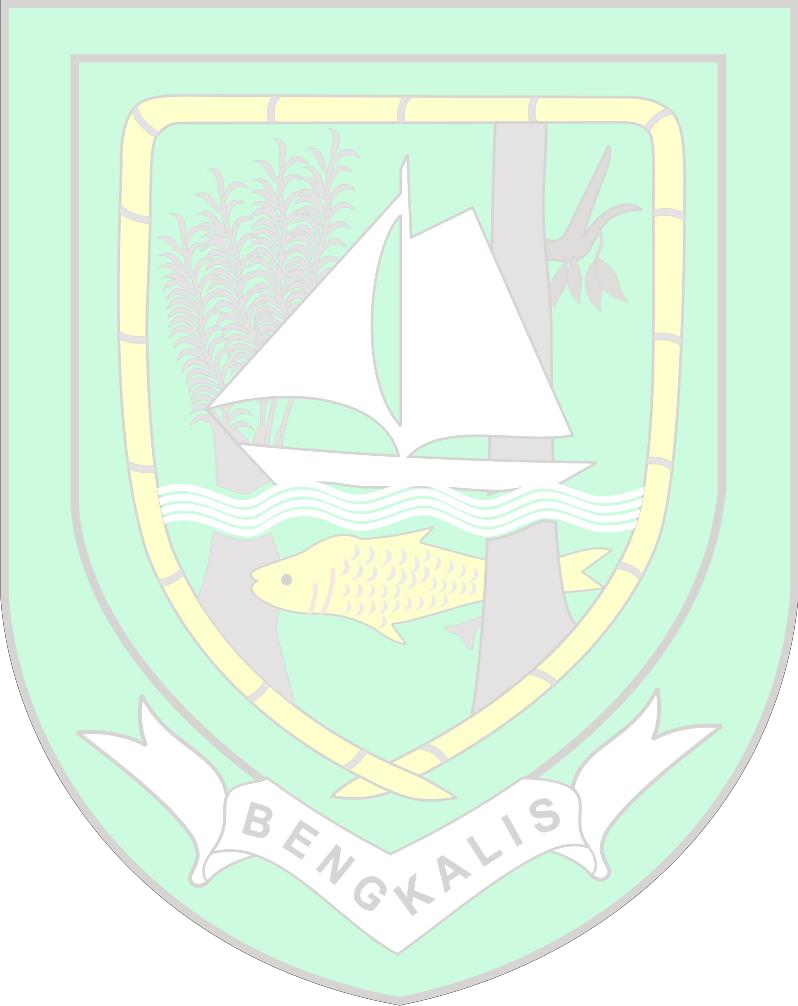
NIP. 19640621 198603 1 00

II

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bathin Solapan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;



2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut, telah ditandatangani perjanjian kinerja Tahun 2018 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.

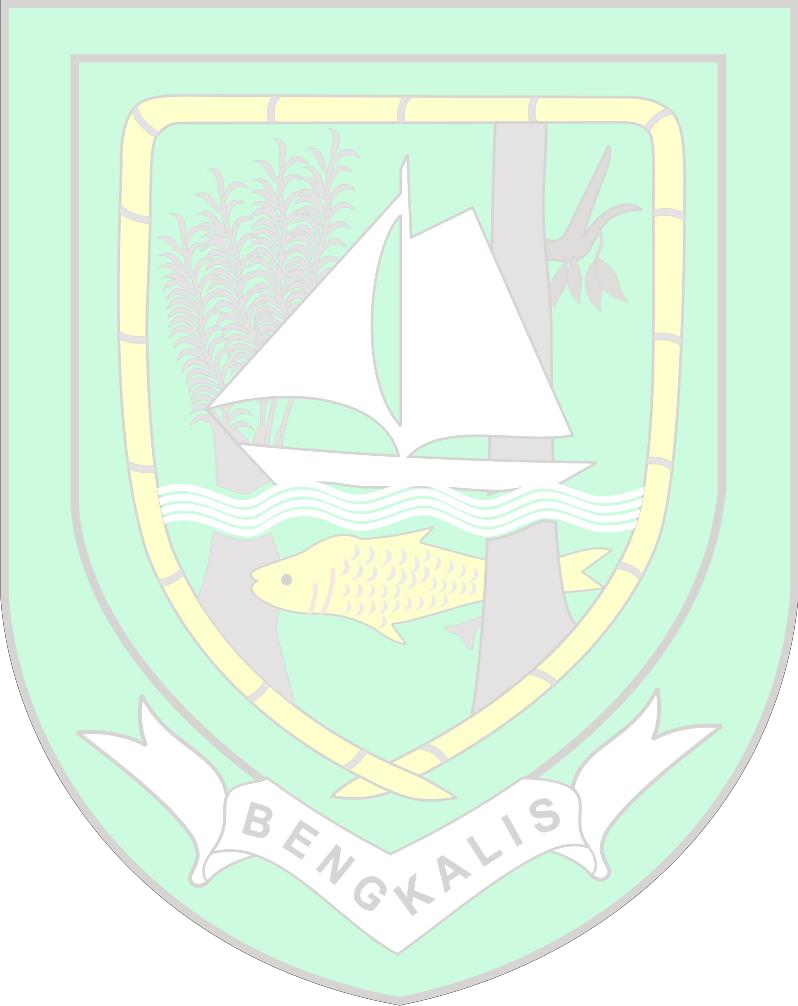
Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2018, Kecamatan Bathin Solapan terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2018. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban wilayah dengan indikator Tingkat kejahatan/ gangguan kamtibmas. Serta sasaran ketiga yaitu Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja

Secara keseluruhan sasaran bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan dengan indikator Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat.

III

Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 Kecamatan Bathin Solapan telah tercapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Bathin Solapan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Bathin Solapan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk Tahun 2018, Kecamatan Bathin Solapan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance.*



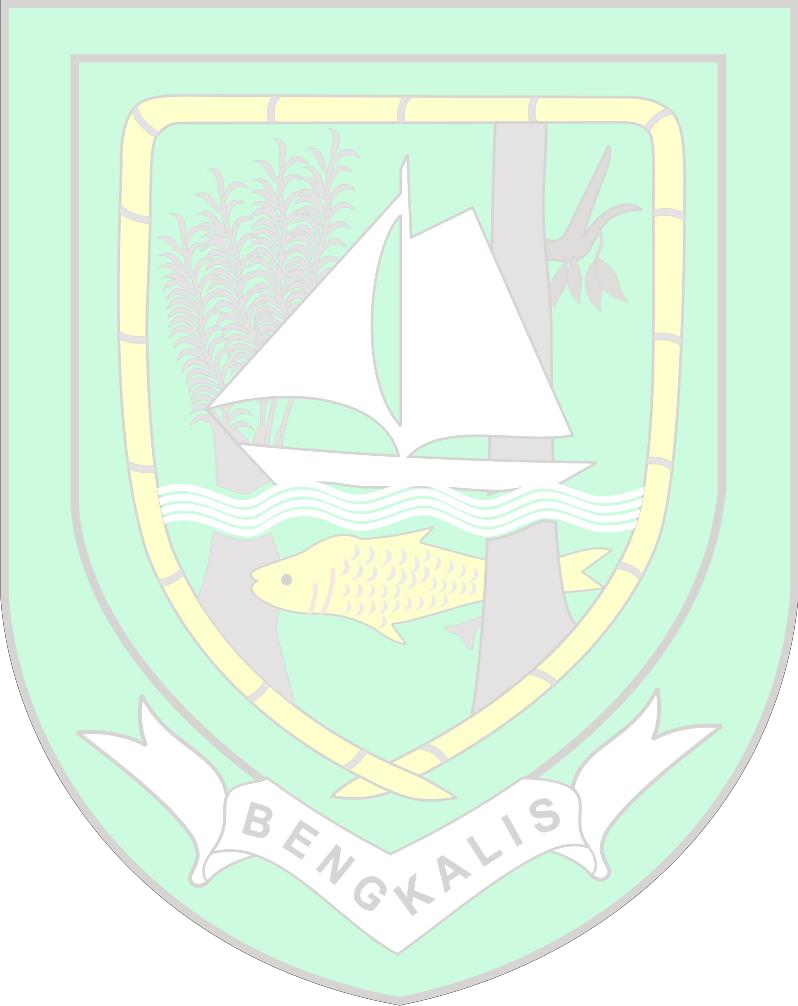
IV

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

A. **Latar Belakang**

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pegikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

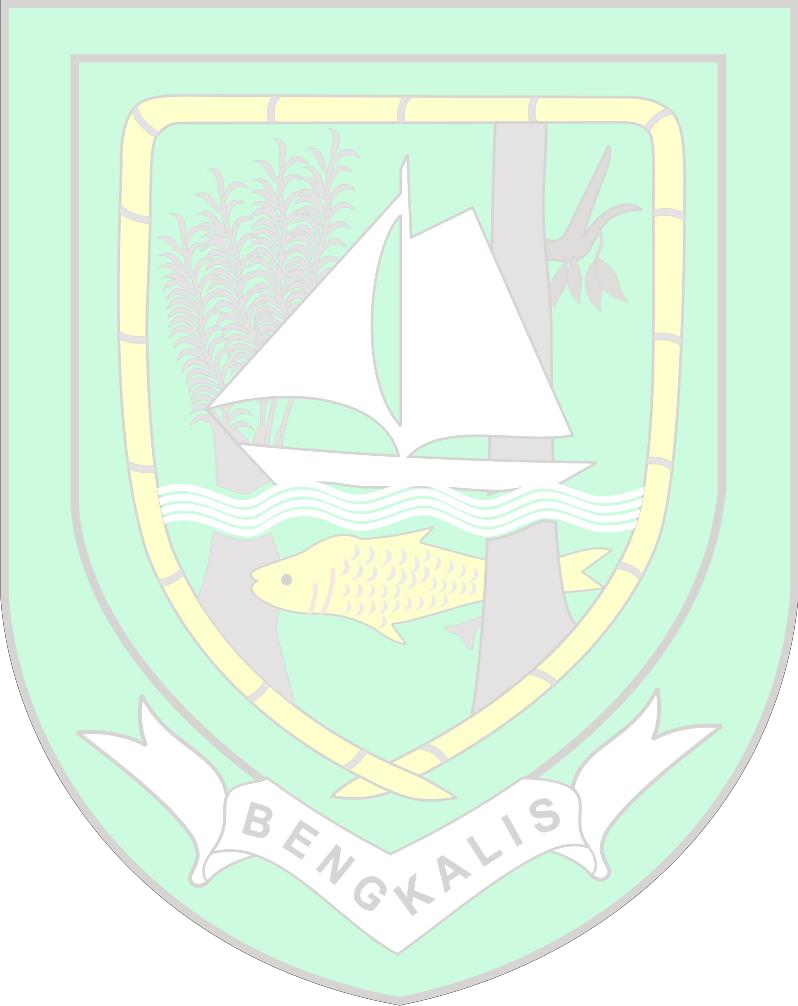
Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis wajib melaporkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2018.

1

**B. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bathin Solapan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2018. Adapun tujuannya adalah ***Pertama***, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Bathin Solapan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. ***Kedua***, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Bathin Solapan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

**C. Tugas dan Fungsi**



Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2

**D. Struktur Organisasi**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Bathin Solapan Kabupaten

Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut:

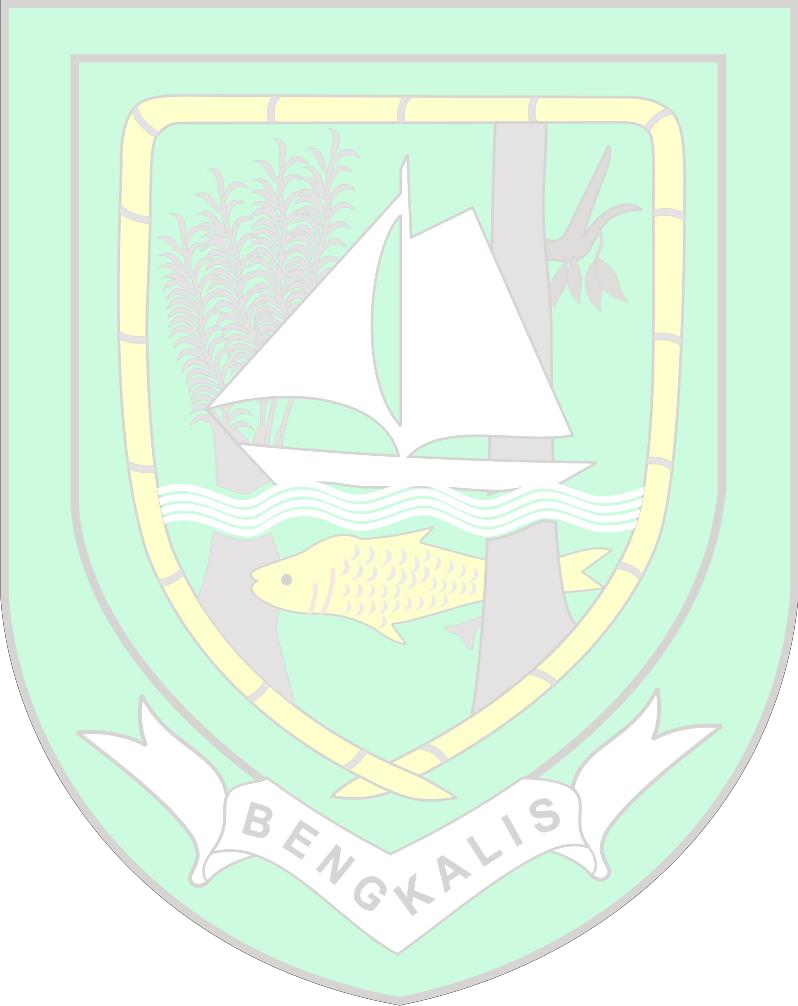
1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan. Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

2. Seksi Tata Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan pemerintahan Desa serta di bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

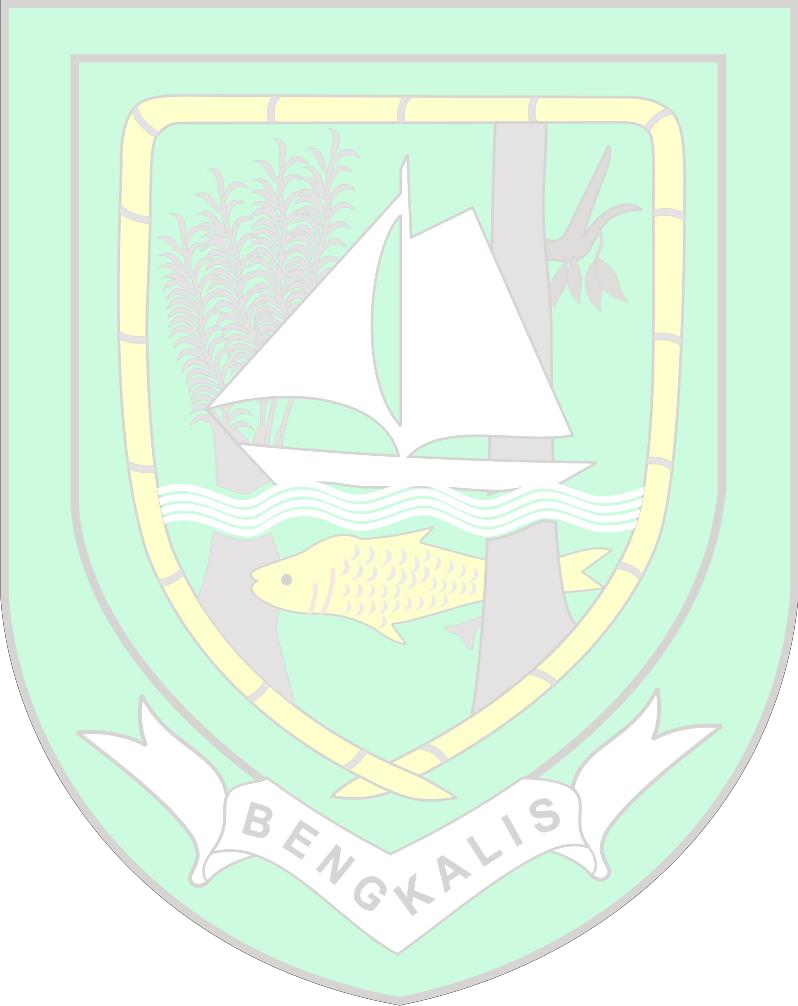
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

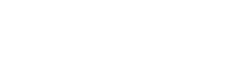
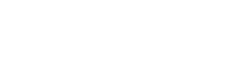
6. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pelayanan umum pengordinasian

3

pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :





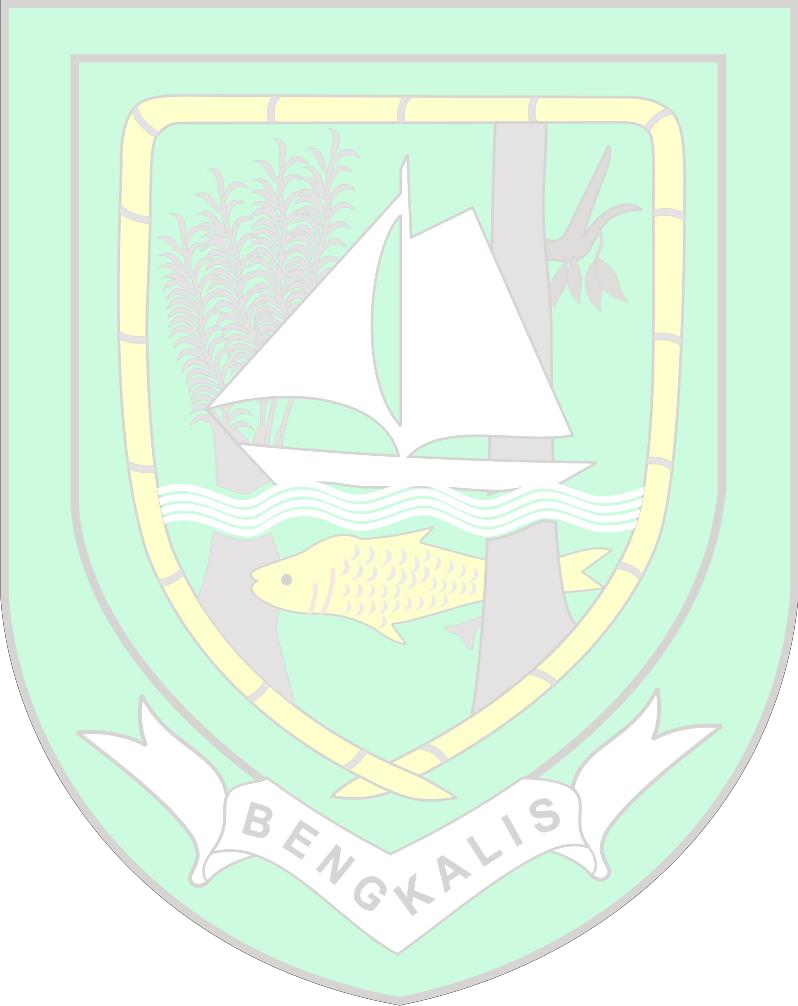
4

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Kecamatan Bathin Solapan tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2018.

1. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

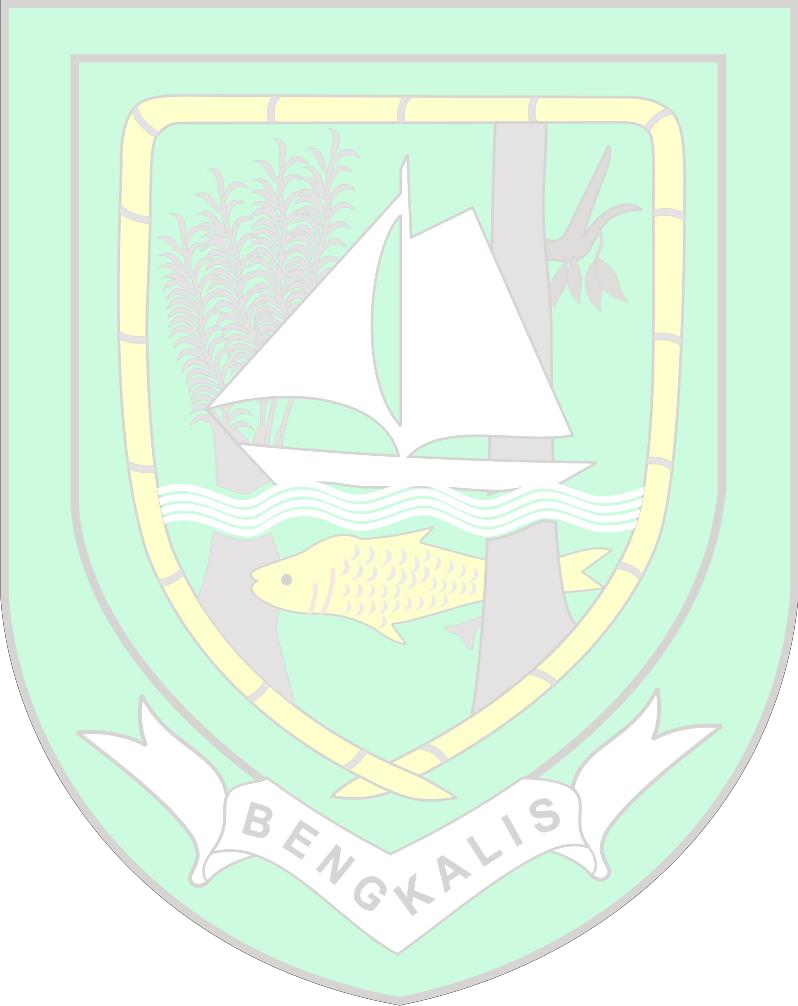


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Indikator** | **Target** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional | Indeks kepuasan masyarakat | - | - | 83,15% | 86,50% | 89,35% | 95,60% |
| Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban wilayah | Presentase ganguan keamanan yang terselesaikan/ dicegah | - | - | 83,00% | 84,25% | 89,00% | 96,50% |
| Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai akuntabilitas kinerja | - | - | 85,25% | 88,50% | 89,15% | 94,00% |

5

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Indikator** | **Target** |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional | Indeks kepuasan masyarakat | 100% |
| Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban wilayah | Presentase ganguan keamanan yang terselesaikan/ dicegah | 100% |
| Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai akuntabilitas kinerja | 100% |



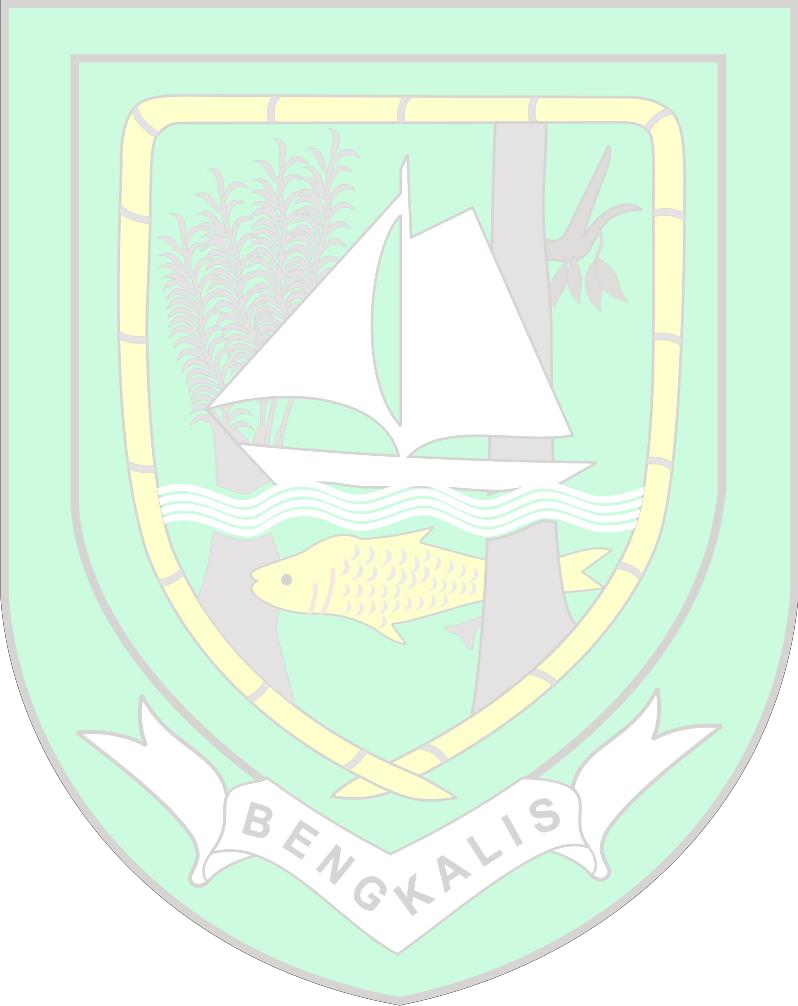
6

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana kerja ditetapkan dengan membuat target kegiatan sasaran yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian target dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai target kinerja ditetapkan secara kuantitatif agar dapat diukur keberhasilannya.

Untuk rencana tahun 2018 indikator kinerja kegiatan telah diidentifikasi mulai dari indikator *input*, *output* sampai dengan *outcome*. Masing-masing indikator ditetapkan satuan ukurannya antara lain beberapa dana, keluaran dan hasil yang akan dicapai pelaksanaan program/kegiatan.

1. **Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tergambar dalam keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran. Target sasaran ditetapkan berdasarkan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Suatu sasaran dapat memuat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Agar adanya parameter, maka setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018, perlu dilakukan evaluasi terhadap sasaran dan kegiatan guna realisasi masukan/ *input*, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Tingkat ]

pencapaian Standar pelayanan minimal berdasarkan rencana tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) standar umum yang akan dicapai dalah sebagai berikut

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kantor Camat Bathin Solapan dengan Sasaran terwujudnya profesionalisme Aparatur Kantor Camat Bathin Solapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan Pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga terwujudnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kantor Camat Bathin Solapan.
3. Meningkatkan sarana dan prasaran pendukung tupoksi bertujuan meningkatnya sarana dan prasarana dikantor camat Rampi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki sebagaimana harapan pemerintah dan masyarakat karena berada pada kategori sangat baik yaitu rata- rata diatas **90%** dan kurangnya respon negative terhadap pelayanan kantor camat Bathin Solapan.

7

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, dimana pelimpahan kewenangan dari Bupati telah berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat karena berada pada kategori sangat baik yaitu rata-rata diatas **90%** dan kurangnya respon negative terhadap pelayanan kantor camat Bathin Solapan.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Bathin Solapan guna terciptanya ketentraman di pemukiman masyarakat. Dengan penyedian sarana dan prasarana siskamling atau mengaktifkan siskamling, sehingga respon masyarakat terhadap pelayanan keamanan dan ketertiban kantor camat Rampi **sangat baik** yaitu rata- rata diatas 90%.

Berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapakan sebelumnya berikut disajikan Pengukuran Kinerja Sekretariat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Indikator** | **Target** | **Realisasi** |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional | Indeks kepuasan masyarakat | 100% | 100% |
| Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban wilayah | Presentase ganguan keamanan yang terselesaikan/ dicegah | 100% | 100% |
| Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai akuntabilitas kinerja | 100% | 100% |

1. **Akuntabilitas Keuangan**

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

8

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan dana sebesar Rp 16.710.560.885,00 yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.233.748.199,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.476.812.686,00 dengan rincian Belanja Langsung sebanyak 4 Program dan 34 Kegiatan.

9

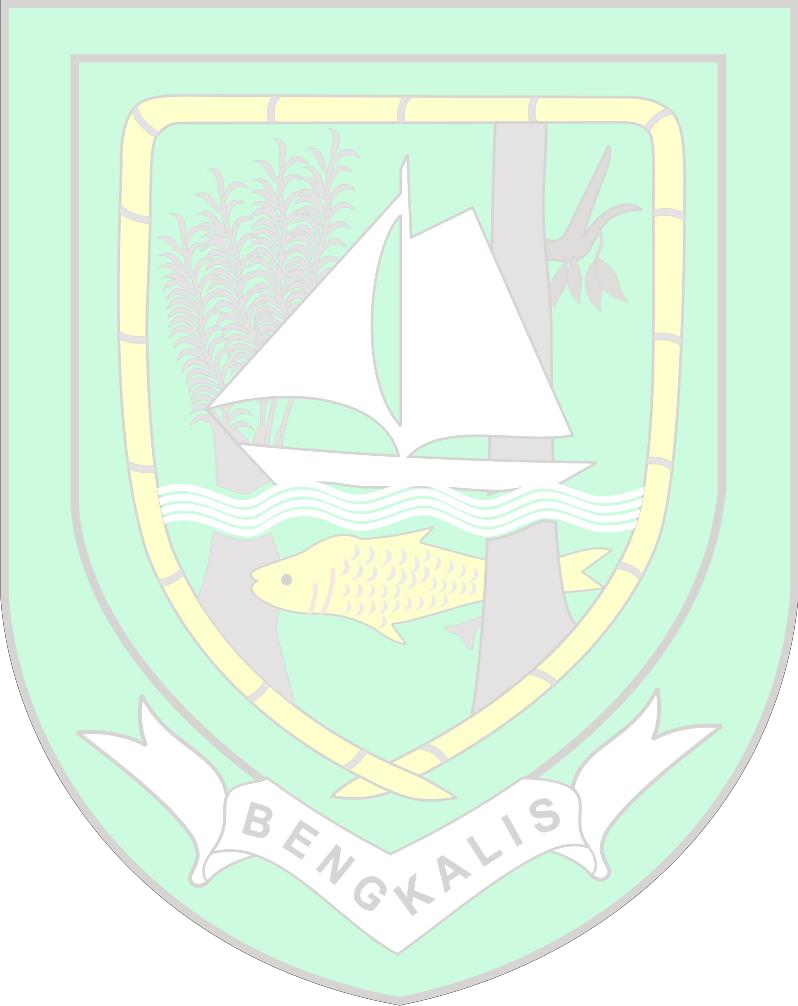
| **NO** | **NAMA/PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN BELANJA** | **REALISASI BELANJA** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **I.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** |  |  |  |
| 1. | Belanja Pegawai | Rp. 4.233.748.199,00 | Rp. 1.927.302.496,00 | 40,40% |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |
| **1** | **URUSAN KEWILAYAHAN** |  |  |  |
| **1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 24.998.000,00 | Rp. 24.998.000,00 | 100% |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Rp.120.500.000,00 | Rp. 28.755.901,00 | 23,86% |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Rp. 5.000.000,00 | Rp. 2.500.000,00 | 50% |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rp. 91.699.600,00 | Rp. 91.699.600,00 | 100% |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp. 33.354.700,00 | Rp. 33.347.519,00 | 99,97% |
| 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. 23.759.600,00 | Rp. 23.750.900,00 | 100% |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 6.763.788,00 | Rp. 6.756.940,00 | 99,89% |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 7.000.000,00 | Rp. 6.900.000,00 | 98,57% |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Rp. 58.500.000,00 | Rp. 58.500.000,00 | 100% |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah | Rp. 340.000.000,00 | Rp. 339.948.268,00 | 99,98% |
| 11 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Rp. 76.800.000,00 | Rp. 76.800.000,00 | 100% |
| 12 | Penyediaan Jasa Sopir Kantor | Rp. 19.200.000,00 | Rp. 19.200.000,00 | 100% |
| 13 | Publikasi Informasi Pembangunan | Rp. 7.000.000,00 | Rp. 7.000.000,00 | 100% |
| **2** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |  |
| 1 | Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor | Rp. 36.990.000,00 | Rp. 34.397.000,00 | 92,98% |
| 2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rp. 204.069.998,40 | Rp. 189.255.000,00 | 92,74% |
| 3 | Pengadaan Mebeleur | Rp. 174.776.000,00 | Rp. 144.237.500,00 | 82,52% |
| 4 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Rp. 31.000.000,00 | Rp. 30.981.398,00 | 99,93% |
| 5 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Rp. 6.200.000,00 | Rp. 6.200.000,00 | 100% |
| 6 | Penyediaan Rumah Dinas Jabatan Gedung Kantor Dan Tempat | Rp. 73.000.000,00 | Rp. 73.000.000,00 | 100% |
| 7 | Perencanaan Dan Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor | Rp. 9.919.420.000,00 | Rp. 78.310.000,00 | 0,29%  10 |
| 8 | Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD | Rp. 35.834.200,00 | Rp. 35.834.200,00 | 100% |
| **3** | **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Di Kecamatan** |  |  |  |
| 1 | Penyelenggaraan Operasi Pekat | Rp. 49.070.000,00 | Rp. 26.000.00,00 | 92,35% |
| 2 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Rp. 28.528.400,00 | Rp. 28.428.400,00 | 99,64% |
| 3 | Pengiriman peserta MTQ | Rp. 225.015.000,00 | Rp. 225.015.000,00 | 100% |
| 4 | Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan | Rp. 38.850.000,00 | Rp. 38.850.000,00 | 100% |
| 5 | Pemantauan Dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan | Rp. 55.550.000,00 | - | 0% |
| 6 | Pembinaan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan APB Desa | Rp. 21.302.600,00 | Rp. 21.302.600,00 | 100% |
| 7 | Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa / Kelurahan | Rp. 10.125.000,00 | Rp. 10.125.000,00 | 100% |
| 8 | Penyusunan Monografi / Profil Kecamatan | Rp. 23.760,000,00 | Rp. 23.760.000,00 | 100% |
| 9 | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Rp. 103.866.000,00 | Rp. 103.300.000,00 | 99,45% |
| 10 | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Rp. 189.790.300,00 | Rp. 189.790.300,00 | 100% |
| 11 | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam Dan Keagamaan | Rp. 146.935.000,00 | Rp. 11.560.000,00 | 7,86% |
| 12 | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan | Rp. 49.322.900,00 | Rp. 49.322.900,00 | 100% |
| 13 | Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran Dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan | Rp. 238.831.600,00 | Rp. 238.831.600,00 | 100% |
|  | **JUMLAH (BTL + BL)** | **Rp. 16.710.560.885,40** | **Rp. 3.960.005.286,00** |  |

11

**BAB IV**

**PENUTUP**

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Bathin Solapan telah dicapai. yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban wilayah dengan indikator Tingkat kejahatan/ gangguan kamtibmas. Serta sasaran ketiga yaitu Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Bathin Solapan antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Bathin Solapan. Namun demikian, untuk Tahun 2018, Kecamatan Bathin Solapan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance.*

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;

2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

12